

Urus Izin Maksimal Satu Jam

 **KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH BATAM**
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU BULAN MEI 2018

JADWAL SAMSAT KELILING

NO	TANGGAL	BUS SAMLING	MOBIL SAMLING	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LAINNYA
1	02 MEI - 06 MEI 2018	NAGAYA HILL	TOP 100 BENGKONG	08.00-12.00 13.00-17.00 18.00-22.00	01 MEI 2018 - HARI BURUH

ADIANSYAH-ALFIAN LUMBAN GAOL,
Batam Kota

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menginstruksikan seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, agar

dalam memberikan pelayanan perizinan tidak lebih dari satu jam. Instruksi ini sesuai amanat Presiden Joko Widodo dalam musyawarah rencana pembangunan nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tidak hanya di internal Pemko Batam,

tapi seluruh instansi lainnya di Batam. "Kami akan panggil semua instansi terkait," kata Rudi usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 di Dataran Engku Putri, Batam Center, Rabu (2/5).

Dikatakannya, sebagai kepala daerah

ia bertanggung jawab menyampaikan pesan presiden tersebut. Apakah amanat presiden itu bisa dilaksanakan sepenuhnya, nanti dibicarakan bersama. Namun sesuai perintah presiden,

■ Baca **URUS**...Hal 11

Urus Izin Maksimal Satu Jam

Sambungan dari hal 9

dilakukan bertahap dengan mendahulukan perizinan yang prioritas.

"Nanti, regulasinya dari pusat bisa berupa undang-undang maupun Keppres atau Perpres," terangnya. Untuk itu, ia meminta seluruh aparat sipil negara bergegas mempersiapkan diri sehingga aturan tidak berbelit-belit lagi. "Perintah presiden ini harus dilaksanakan. Baik di instansi TNI, Polri maupun sipil tidak boleh melebihi satu jam," tegasnya.

MPP Batam Jadi Percontohan

Perintah pelayanan perizinan maksimal satu jam, bagi Batam bukan hal sulit. Apalagi Batam memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sumatera Promotion Center (SPC), Batam Center.

Bukan hanya pejabat di Batam yang sudah tahu ke-

beradaan MPP itu, tapi juga hampir semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia sudah datang ke sana. Tujuannya melihat dan mencontoh pelaksanaan MPP Batam. Apalagi menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), MPP Batam terbaik di Indonesia.

"Kalau yang dari luar Batam saja sudah datang belajar dan melihat proses perizinan di MPP Batam, mestinya kita yang di Batam ini jauh lebih paham, sehingga tak ada lagi lini pelayanan publik yang terkait perizinan yang berbelit-belit," tegas Rudi.

Kepala Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemko Bata Gustian Riau membenarkan kalau MPP Batam memang menjadi rujukan daerah lain untuk mem-

benahi sistem perizinannya.

"Iya, sudah hampir semua kabupaten atau kota yang ada di Indonesia," kata Gustian, kemarin.

Ia mengatakan, banyaknya perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota ke MPP karena keinginan pusat agar perizinan bagi warga dan investor dipermudah dan cepat.

"Kalau Batam ini sudah jalan dengan MPP-nya. Tetapi sejak dari dulu, perizinan di Pemko memang sudah mendapat apresiasi," ujarnya.

Di MPP ini lebih dari 340 perizinan bisa diurus. Semua dibuat sebaik mungkin agar semua investor bisa nyaman. Termasuk proses perizinan dan durasi pengurusan izin dibuat terbuka dan transparan.

"Masalah perizinan ini adalah masalah yang mendasar dalam hal perizinan. Dengan MPP ini mudah-mudahan akan

semakin banyak investor datang ke Batam," harapnya.

Konsep MPP ini, menurut Gustian, memang sudah sesuai dengan keinginan investor dan pemerintah pusat. Tujuannya untuk mempermudah pengurusan izin dengan menempatkan semua instansi yang mengeluarkan izin berada dalam satu gedung.

"Jadi, dari segi waktu dan biaya, sangat murah. Dan tentunya sangat cepat. Dalam waktu dekat, MPP ini akan segera diresmikan oleh Pak Presiden," jelasnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Tumbur Sihalohe mengatakan MPP ini sangat bagus dan sudah lama ditunggu. "Kalau selama ini banyak urus izin di tempat yang berbeda-beda. Jadi sekarang sudah mudah, karena hanya di satu tempat saja," katanya.***

Omzet di Atas Rp 100 Juta Wajib Pindah ke Ruko

Sambungan dari hal 9

jalan.

Dalam pembahasan tersebut, awalnya perwakilan Disperindag menginginkan pembatasan lamanya berjualan PK-5 untuk selanjutnya pindah ke ruko atau outlet. Namun, tak diresmikan seluruh anggota pansus inisiasi PK-5. Mereka menegaskan, terkait pemindahan tersebut yang pas harus berdasarkan omzet yang didapat pedagang.

"Soalnya banyak juga PK-5 di Batam yang omzetnya sudah hampir mencapai Rp 100 juta per bulannya, tapi tetap mengaku kalau omzetnya kecil. Mereka tak mau memindahkan usahanya atau

jualannya ke ruko. Alasannya karena tempat ia berjualan saat ini memang membawa hoki dan strategis. Itu alasan mereka tak mau berpindah ke ruko atau membuka outlet sendiri," ujar Zulkarnain, perwakilan Disperindag Batam.

Anggota pansus inisiasi ranperda PK5 lainnya, Erizal Kurai menegaskan patokan untuk PK-5 pindah ke outlet atau ruko itu yang tepat berdasarkan jumlah omzet yang didapatnya, bukan berdasarkan lamanya mereka berjualan. Banyak juga para PK-5, lanjutnya, yang sudah berjualan bahkan belasan tahun lamanya, tapi tetap saja omzetnya tak mening-

kat, justru cenderung merosot.

Sementara itu, Ketua Pansus Inisiasi Ranperda PK-5 DPRD Batam Harmidi Umar Husein mengatakan, pembahasan ranperda tersebut untuk disempurnakan kembali, terkait masih adanya pasal-pasal yang kurang tepat atau masih harus diperbaiki lagi.

"Artinya dengan adanya ranperda PK-5 yang nantinya akan dijadikan Perda PK-5, untuk memberikan payung hukum terhadap keberadaan PK-5 yang ada di Batam yang selama ini belum ada payung hukumnya," terang Harmidi.

Harmidi berharap, dengan disahkannya Perda PK-5

nantinya akan mampu mendorong perekonomian masyarakat Batam yang diawali dari PK-5 atau usaha kecil yang dijalankan masyarakat bawah.

Sebab, sambungnya, selama ini keberadaan PK-5 kurang diakomodir oleh pemerintahan di Batam. Misalnya untuk mendapatkan perizinan berjualan di pinggir jalan atau tempat lain, dekat *buffer zone*, pedagang harus mengurus izin sendiri ke BP Batam.

"Harusnya hal-hal seperti itu kan sudah harus difasilitasi oleh pemerintah Batam bukan pedagang diharuskan mengurus sendiri," terang Harmidi mengakhiri. (gas)

Daging Mahal Ulah Pedagang

Harga dari Distributor Rp 65 ribu-Rp 80 Ribu Per Kg



GGOTA Satlantas Polresta Barelang, Brigadir Yudhi memeriksa surat-surat kendaraan saat razia di Jalan Ahmad Yani atau di dekat GOR Temenggung Abdul Jamal, Seibeduk, Rabu (2/5). Selama Operasi Patuh 2018, polisi menemukan 1.254 pelanggaran lalu lintas.

1.254 Pelanggar Lalu Lintas Ditindak

dalam Operasi Patuh, Didominasi Sepeda Motor

ONGSA (BP) - Polda Kepri mencatat, selama Operasi Patuh dari 26 April hingga 2 Mei, terjadi 1.254 pelanggaran lalu lintas. Sebagian dilakukan pengendara sepeda motor dua dan roda empat di wilayah Kepri. Pelanggaran didominasi pengendara sepeda motor, dengan latar belakang profesi karyawan swasta yang dominan yang melala-

wan arus, menggunakan ponsel saat mengemudi, pengendara di bawah umur, dan tidak menggunakan safety belt.

"Sepeda motor terlibat pelanggaran sebanyak 732, sementara roda empat hanya 98 saja," tuturnya.

Pemetaan pelanggaran aturan lalu lintas ini dilakukan oleh

12 orang. Kendaraan yang paling sering terlibat kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor. Usia korban kecelakaan di rentang 16 hingga 20 tahun, tercatat 19 korban.

"Pelakunya juga usia muda," tutur Erlangga.

Penyebab kecelakaan ini

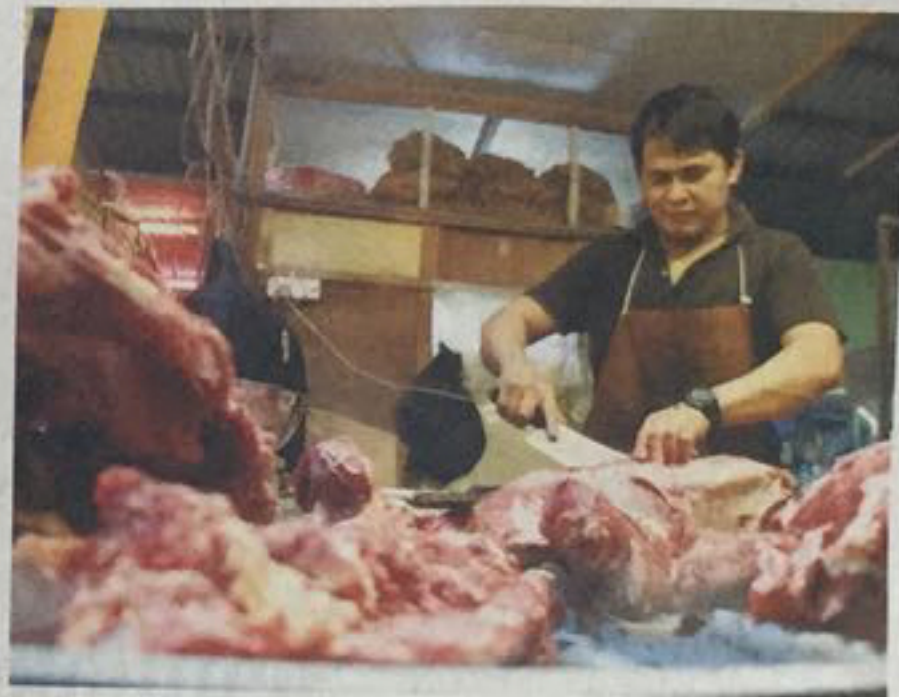
GALIH ADI SAPUTRO, Batam Kota

MAHALNYA harga daging sapi beku di Batam yang mencapai Rp 90 ribu atau melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 80 ribu per kilogram (kg) di beberapa pasar membuat para distributor heran. Pasalnya, harga daging dari distributor tak mengalami kenaikan.

"Saya kaget baca berita di Batam Pos, banyak pedagang pasar jual daging sapi di atas HET. Sebab, dari kami distributor daging sapi belum ada kenaikan, masih stabil antara Rp 65 ribu hingga Rp 80 ribu saja," ujar William, distributor PT Batam Frozen Food (BFF), Rabu (2/5).

Kenaikan harga daging sapi di pasar itu membuat distributor akhirnya turun ke pasar-pasar tradisional untuk mengeceknya. Menurut William, dirinya sudah turun ke pasar di wilayah Batam Kota dan Bungkaya Todoh. Namun, saat dicek harga daging sapi per kg masih di kisaran harga Rp 75 ribu hingga Rp 85 ribu, tak sampai Rp 90 ribu.

"Kalau benar ada harga daging sapi setinggi itu, itu bisa merusak harga daging sapi di pasaran. Itu artinya para pedagang daging sapi di pasar sendiri yang memainkan harga jadi mahal," kata William.



TONI, pedagang daging di Pasar Mega Legenda, Batam Kota memotong daging beku yang akan dijual kepada pelanggannya, Rabu (26/4) lalu. Distributor daging beku mengklaim harga jual dari mereka tak naik.

F. GEOP MULYANA/BATAM POS

ia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pedagang pasar yang ia pasok agar tidak menaikkan harga semuanya.

"Sebab, jika harga daging sapi dipatok mahal, otomatis juga akan merugikan distributor karena penjualan daging makin sedikit," terangnya.

Hal ini juga dibenarkan Acin, pemilik PT Dewi Kartika Inti, distributor daging di Batam. Ia membantah kalau harga daging sapi saat ini sampai Rp 90 ribu per kg.

"Kami saja masih ada jualan ke pedagang daging sapi di pasar mulai Rp 65 ribu kok,

dan paling mahal Rp 80 ribu. Masa mau dijual ke masyarakat Rp 90 ribu per kg, ambil untungnya sudah kelewat batas," kata Acin.

Karena itu, Acin mengaku pihaknya ikut turun ke lapangan untuk membantu pemerintah menstabilkan harga daging sapi. Jika pihaknya menemukan pedagang di pasar yang mematok harga berlebih, akan ada sanksi.

"Kami akan stop itu pasokan dagingnya. Terserah mereka mau ambil ke distributor lainnya, daripada merusak usaha kami," terang Acin.

Sementara, terkait harga

ayam potong yang naik dalam beberapa waktu belakangan ini, diakui Acin karena harganya naik dari distributor pusat di Jakarta. Sebelumnya, harga ayam potong per kg dari distributor utama paling mahal Rp 28.500. Saat ini, harga dari distributor utamanya sudah Rp 31.500 hingga Rp 32 ribu per kg.

"Kami saja ke pedagang pasar sudah menjual mulai Rp 34 hingga Rp 36 ribu. Jadi, kalau harga ayam potong saat ini di harga Rp 37 ribu hingga Rp 40 ribu, itu wajar. Karena dari bos utamanya saja sudah tinggi," tutupnya.***

Batam Terapkan Sistem OSS, Perizinan Selesai 30 Menit

35 Pungutan Bebani Pengusaha

RIFKI SETIAWAN LUBIS, Batam

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Selain mengurai sistem perizinan yang berbelit, pemerintah juga mulai menghapus beragam pungutan yang dinilai membebani pengusaha.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan selama ini setidaknya ada 35 jenis pungutan yang harus dibayar pengusaha kepada pemerintah pusat dan daerah. 35 pungutan itu terdiri dari 15 pe-

nerimaan negara bukan pajak (PNBP), 10 pajak pemerintah daerah, dan 10 pajak pemerintah pusat.

Selain itu, pengusaha masih harus melalui 52 prosedur dan menyiapkan 41 persyaratan lainnya untuk mendirikan sebuah kawasan bisnis.

"Ini lucu sekali. Sangat membebani pengusaha," kata Edy dalam acara bisnis forum dengan tema 'Menuju Kemudahan Perizinan Investasi di Kawasan Industri Melalui Rencana Penerapan OSS di Hotel Nagoya Hill, Batam, Rabu (2/5).

■ Baca 35 ...Hal 2



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

SUASANA Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam di Gedung Sumatera Batam Center, Rabu (11/4). Mulai 20 Mei, MPP Batam akan menerapkan sistem perizinan one single submission (OSS).

Makanya, kata Edy, pemerintah pusat getol sekali mengubah wajah birokrasi perizinan saat ini. Sehingga lahirlah Peraturan Presiden (Perpres) 91/2017 tentang Percepatan Perizinan Berusaha.

"Ini merupakan evaluasi kebijakan agar lebih pro bisnis. Idenya lahir dari Kelompok Kerja (Pokja) 3 karena perizinan sangat lambat. Paket ini sebenarnya untuk menyayangi pengusaha supaya jangan merajuk," paparnya.

Dari Perpres itu kemudian lahirlah sistem perizinan *one single submission* (OSS) yang akan mulai diterapkan di Batam per 20 Mei ini. Dengan sistem ini pengurusan izin usaha dapat diselesaikan hanya dalam waktu 30 menit saja.

Edy mengatakan pengurusan izin usaha yang ekstra cepat itu sudah meliputi semua perizinan. Mulai dari izin dasar,

izin usaha industri, nomor induk perusahaan, dan lainnya. "Maka setelah itu investor bisa langsung konstruksi," kata Edy

Edy menjelaskan, secara garis besar sistem OSS memiliki 10 keunggulan. Yakni *single filling, synchronous processing, single risk management, terintegrasi, single billing, single submission, single approval, single reference, single helpdesk, dan single monitoring.*

Sistem OSS juga mampu merekap semua Nomor Induk Perusahaan (NIP) seluruh perusahaan di Indonesia. Sehingga sekali masuk, maka bisa mengurus dokumen perizinan seperti SIUP, TDP, dan lainnya. Semuanya sudah dilacak oleh komputer sehingga lebih mudah keluar izin berusaha. "Investor hanya tinggal *ngopi-ngopi* saja sambil menunggu," ucapnya.

Saat ini ada sekitar 1.200-an investasi baru yang akan dikawal melalui program OSS. "Pengawasan dilakukan oleh Satgas sejak investor menda-

patkan komitmen untuk berinvestasi," katanya lagi.

Penyelenggaraan OSS tidak bisa lepas dari peran Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi tempat memperoleh perizinan. PTSP lahir karena dorongan dari Kementerian Dalam Negeri lewat Permendagri 138/2017.

Permendagri ini mengatur penyelenggaraan perizinan dan non perizinan melalui PTSP daerah sebagai upaya percepatan pelaksanaan berusaha di daerah dan pedoman penyelenggaraan PTSP yang prima.

"Peranan PTSP sangat strategis dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha agar lebih cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Saya yakin nanti akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan investasi di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat," ucap Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo.

Sedangkan Deputi Bidang

Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tamba Hutapea mengatakan, perubahan perilaku birokrasi dari penguasa perizinan menjadi pelayanan perizinan sudah mulai terjadi untuk mempercepat pelaksanaan berusaha di Indonesia.

"Mendagri dan BKPM akan mendorong pembentukan Satgas bagi daerah yang belum membentuk Satgas sesuai dengan amanat Perpres 91/2017. Satgas ini penting karena sistem pelayanan perizinan dan pemberian fasilitas insentif fiskal terintegrasi secara OSS siap dioperasikan secara nasional," ungkapnya.

Sistem OSS ini diluncurkan karena target rencana atau komitmen investasi periode 2015-2017 sebesar Rp 5.338,3 triliun. Dan dari Sumatera masih belum mencapai realisasi. Targetnya adalah Rp 1.010,6 triliun tapi yang terrealisasi hanya Rp 321,9 triliun. Dari Kepri total realisasi investasi yang diperoleh

sebanyak Rp 31,4 triliun dan 61,8 persennya datang dari Batam. Sehingga dianggap belum optimal.

Lalu bagaimana tanggapan pengusaha? Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Sanny Iskandar mengatakan, paket kebijakan ekonomi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan berinvestasi sehingga dapat memberikan efek yang cukup signifikan kepada investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Saya berharap OSS ini dapat merasionalkan peraturan dengan menghilangkan duplikasi, melakukan keselarasan antar peraturan, melakukan konsistensi peraturan, simplifikasi seperti satu identitas pelaku, sedikit persyaratan, pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem *online*," katanya.

Kapal Pesiar Terbakar di Perairan Batam

Sambungan dari hal 1

Bahkan sebagian warga b

Batam sebagai *pilot project* OSS dianggap sangat tepat. Karena Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah ada di Batam sebagai sarana implementasi OSS yang dapat menjadi percontohan bagi OSS di daerah lainnya di Indonesia.

"Kemudahan-kemudahan perizinan seperti inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh para investor. Tentu saja OSS ini dapat meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi yang kondusif," katanya.

Sedangkan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya sudah siap melaksanakan OSS bekerjasama dengan Pemko Batam. "Kami siap laksanakan OSS perizinan di BP dan Pemko. Tinggal mengintegrasikannya," jelasnya.

Lukita mengungkapkan bahwa BP memang memita

agar Batam jadi *pilot project* OSS. Penyebabnya adalah karena sudah memiliki MPP dan Batam juga merupakan kawasan industri yang butuh investor.

"Kita sejak Desember langsung minta jadi *pilot project*. SDM kami siapkan dengan mengintegrasikannya dengan Pemko Batam," katanya.

Sementara Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengungkapkan pihaknya telah membentuk Satgas OSS tingkat provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri.

Wagub berharap penerapan sistem OSS ini semakin menggalakan investasi di Batam dan Kepri. "Informasi OSS ini harus sampai seluas-luasnya. Kita harus ubah paradigma. Semoga pelaku industri dapat bersinergi dan kembangkan perizinan agar bisa laksanakan OSS," harapnya.***

bakaran, ternyata api sudah membesar dan melumat habis seluruh badan kapal. Kapal

Menurut warga, di dalam kapal tersebut tidak ada

Wali Kota Tambah Dana PIK Pesisir

SEKUPANG (BP) - Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan menganggarkan Rp 2 miliar untuk program Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) di hinterland atau kawasan pesisir pada tahun 2019 mendatang.

"Karena permintaan masyarakat saya akan tambah dana PIK khusus pesisir," kata Rudi, Rabu (2/5).

Ia menyebutkan dari 64 kelurahan di wilayah Kota Batam, 16 kelurahan di antaranya berada di wilayah pesisir. Peningkatan dana PIK sebesar Rp 800 juta per kelurahan ini diharapkan bisa menjadikan infrastruktur di hinterland semakin membaik.

"Jangan ada perbedaan kota dan pesisir terutama dari segi infrastruktur. Seperti dik-

etahui tahun ini kami tengah sibuk melakukan pelebaran jalan di kota," beber Rudi.

Sementara itu, Camat Belakangpadang Asraf Ali mengungkapkan untuk infrastruktur pesisir saat ini hanya mengharapkan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Kondisi ini berbeda dengan mainland yang mudah mendapatkan bantuan dari

Pemko Sediakan 64 Ribu Paket...

Sambungan dari hal 9

"Silakan nikmati sembako murah ini. Semoga bisa membantu meringankan masyarakat Kota Batam," kata Wali Kota.

Rudi mengungkapkan bahwa Pemko Batam terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kurang mampu baik dalam bentuk bantuan langsung tunai maupun paket sembako. Hal ini terbukti ditambahnya anggaran untuk pengadaan sembako murah dari tahun sebelumnya.

"Tahun ini ada 128 ribu paket, dan langsung didistribusikan ke kelurahan agar warga tidak perlu jauh ke kantor kecamatan. Ini juga agar lebih efisien dari segi ongkos juga," tambah mantan anggota DPRD Batam ini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Disperindag Kota Batam Zarefriadi mengatakan, Kecamatan Belakangpadang mendapat alokasi sebanyak enam ribu paket. Untuk di Pulau Kasu sebanyak 1.000 paket dan 417 untuk di Pulau Pemping. Sedangkan di Kelurahan Sekanak Raya sebanyak 1.613 paket, di Kelurahan Tanjung Sari 1.063 paket, di Kelurahan Pecung 617 paket, dan di Pulau Terung berjumlah 1.290 paket.

Paket sembako terdiri dari

beras 5 kilogram (kg), minyak goreng kemasan 2 liter dan gula kemasan 1 kg. Penerima sembako cukup membayar Rp 50 ribu dari harga sebenarnya Rp 99.650 per satu pakethnya.

"Semoga sembako murah ini bisa membantu penerima dalam menghadapi bulan puasa," harapnya.

Sementara itu, Camat Belakangpadang Asraf Ali menyebut paket sembako murah untuk Kecamatan Belakangpadang sudah didistribusikan sampai ke titik lokasi yang telah ditentukan sebanyak 6 ribu paket. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali yang telah menyelenggarakan program sembako murah," ujarnya.

Ia menambahkan selain sembako murah, pihaknya sangat senang dengan program peningkatan infrastruktur kelurahan (PIK). Sebab sekarang jalan lingkungan maupun jerambah atau pelantar di enam kelurahan sudah semakin bagus. "Kami berharap tahun depan kami bisa dapat lagi, dan semoga lebih besar lagi anggarannya," imbuhnya.

Kemarin, ratusan warga terlihat antre menunggu mendapatkan paket sembako murah dari panitia. Berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kupon, warga sangat

senang bisa membawa paket sembako dengan harga murah. "Alhamdulillah, kami sangat senang. Terima kasih Pak Wali," kata Suhasmah, usai mendapatkan paket sembako murah.

Sagulung Dapat 6.000 Paket

Untuk tahap pertama, Kecamatan Sagulung juga akan mendapat 6.000 paket sembako murah. Camat Sagulung Reza Khadafy mengatakan pendistribusian sembako murah itu dilakukan tiga hari sebelum bulan Ramadan. "Dijadwalkan tanggal 12 Mei mendatang kita distribusikan," ujar Reza, kemarin.

Dia mengatakan, ribuan paket sembako murah itu dibagikan ke enam kelurahan. Masing-masing kelurahan mendapatkan 1.000 paket sembako. "Sengaja disalurkan jelang Ramadan, agar warga kurang mampu mendapatkan sembako untuk persiapan Ramadan," kata Reza.

Paket sembako ini, didistribusikan di tiga titik sesuai dengan kelurahan yang terdekat. Yakni, SP Plaza, Ruko BBC, dan di Masjid Darul Gufron. Sementara untuk harganya, Reza menyebut masih sama seperti yang dulu. Yakni Rp 50 ribu per paket terdiri dari beras, gula, dan minyak goreng kemasan. (yui/une)

NO.	TANGGAL	LOKASI	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
1	01 MEI - 05 MEI 2018	KEC. CENTRAU PASAR NITRA LEBANDA	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	01 MEI 2018 - HARI BAHU
2	07 MEI - 12 MEI 2018	KEC. BEMOHONG PASAR NITRA KEVA	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	08 MEI 2018 - HINGGA 10 MEI 2018 - KEMBAR DA BUKHIN

JADWAL SAMSAT ANTAR PULAU

NAMA / TEMPAT	SAMBAT ANTAR PULAU	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
STUMP NABU (TOL. ST. 04 MEI 2018)	BELAKANGPADANG (KANTOR KELURAHAN TANJUNG SARI)	08.00 - 14.30 WIB 12.00 - 13.00 WIB	
STUMP SELASA (TOL. 08 MEI 2018)	POL. SATPOL PP SAMPUNG KERTING PULAU CALANG	08.00 - 14.30 WIB 12.00 - 13.00 WIB	01 MEI 2018 - HARI BURUH

TERAS

Omzet di Atas Rp 100 Juta Wajib Pindah ke Ruko

BATAM KOTA (BP) - Pemerintah Kota Batam akan mengambil kebijakan larangan pedagang kaki lima yang beromzet di atas Rp 100 juta bertahan di tepian jalan. Usahanya wajib dipindahkan ke outlet atau ruko.



F. DALIL NARAHAAP BATAM POS
Sukaryo

"Kalau omzetnya Rp 100 juta per bulan tetapi masih tetap berjualan di tepi sungai atau di badan jalan, itu sudah tak logis lagi. Makanya kami ingin mereka diwajibkan memindahkan usahanya ke ruko ataupun outlet," ujar anggota Pansus Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) keberadaan pedagang kaki lima (PK-5) DPRD Batam, Sukaryo, Rabu (2/5).

Panitia Khusus (Pansus) Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) keberadaan pedagang kaki lima (PK-5) DPRD Batam, menggelar pembahasan bersama perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di ruang serbaguna DPRD Batam, Rabu (2/5) siang.

Pada pembahasan tersebut, ada beberapa poin terkait keberadaan PK-5, salah satunya yang beromzet di atas Rp 100 juta wajib memindahkan usahanya ke outlet atau ruko, tak boleh lagi tetap berdagang di pinggir



F. HUBAS PEMKO BATAM UNTUK BATAM POS

WALI Kota Batam Muhammad Rudi menyerahkan paket sembako murah secara simbolis kepada masyarakat di Belakngpadang, Rabu (2/5). Tahun ini, Pemko Batam menyediakan 128 ribu paket sembako murah yang akan disebar di seluruh kecamatan.

Pemko Sediakan 64 Ribu Paket Sembako Murah

Belakngpadang Dapat Jatah 6.000 Paket

BELAKANGPADANG (BP) - Menyambut bulan suci Ramadan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam menggelar bazar sembako murah. Untuk putaran pertama tahun 2018 ini, Pemko menyediakan sebanyak 64 ribu paket sembako murah untuk masyarakat.

Rabu (2/5) kemarin, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyerahkan paket sembako murah secara simbolis kepada masyarakat di Kelurahan Kasu, Kelurahan Pemping, Kelurahan Pecung, Kelurahan Tanjung Sari, dan Kelurahan Sekanak Raya, Belakngpadang.

International Education Fair






Kios Liar Aviari segera Dibongkar

BATUAJI (BP) - Ketua Tim Terpadu Kota Batam Suzaeri menegaskan akan segera membongkar kios liar yang ada di sekitar pasar seken Aviari, Batuaji. Pasalnya, laporan dan keluhan mengenai keberadaan kios tersebut sudah banyak. Terlebih, kios tersebut berdiri di lokasi yang diperuntukkan untuk penghijauan.

"Itu akan segera kita bongkar. Tidak boleh dibiarkan di sana karena memang itu untuk ruang terbuka hijau (RTH)," kata Suzaeri di kantor Camat Batuaji, Rabu (2/5).

Menurutnya, pasar seken Aviari saat ini sangat semrawut. Padahal, lokasi tersebut bisa ditata dan menciptakan rasa nyaman bagi pengunjung yang hendak berbelanja.

"Memang harus ditertibkan. Apalagi camat sudah mengeluarkan surat agar dihentikan pembangunannya," katanya.

Sementara itu, Camat Batuaji Ridwan juga mengaku pihak pengelola kios tersebut membandel karena terus melanjutkan pembangunan. Ia



F. EUSEBIUS/BATAM POS

DERETAN kios liar yang dibangun di lahan hijau dekat Pasar Aviari, Batuaji, Senin (5/3) lalu. Tim Terpadu akan menggusur kios liar tersebut dalam waktu dekat.

berharap, warga bijaksana dalam memilih tempat berusaha. "Intinya, itu bangunan ilegal dan akan dibongkar. Batam ini sudah kekurangan RTH. Kok yang ada masih digunakan untuk kios liar," katanya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Werton Panggabean mendukung Tim Terpadu menertibkan kios liar tersebut. Itu penting agar tidak ada lagi oknum yang mengam-

bil keuntungan dengan menggunakan lahan milik negara.

"Itu jelas untuk RTH, kalau nanti dibongkar oleh Tim Terpadu, ya tidak boleh protes. Memang itu bukan untuk komersial," katanya.

Menurutnya, kios liar tersebut hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Tetapi merugikan pemilik ruko yang jelas legalitasnya. "Yang di ruko bayar pajak. Tetapi kios liar itu tidak ada," katanya. (ian)